

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Pendidikan merupakan upaya yang dapat mempercepat pengembangan SDM untuk mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya. Pendidikan merupakan suatu proses pembentukan manusia untuk menumbuh kembangkan potensi yang ada. Sangat jelas dinyatakan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3 fungsi dan tujuan pendidikan nasional adalah penyelenggaraan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif dan mandiri.

Pembiayaan pendidikan merupakan suatu konsep yang seharusnya ada dan tidak dapat dipahami tanpa mengkaji konsep-konsep yang mendasarinya. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (*instrumental input*) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan di sekolah tidak dapat dilaksanakan. Biaya (cost) dalam pengertian ini memiliki cakupan yang

luas yakni semua jenis pengeluaran yang berkenan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga. Dalam pengertian ini misalnya iuran siswa adalah jelas merupakan biaya, tetapi sarana fisik, buku sekolah dan guru juga adalah biaya, bagaimana biaya-biaya itu direncanakan, diperoleh, dialokasikan merupakan persoalan pembiayaan atau pendanaan pendidikan (*educational finance*).

Biaya pendidikan yang berasal dari pemerintah khususnya yang diarahkan pada sekolah dasar terpencil tentu memerlukan manajerial yang tepat sebagai pengelola agar penggunaan anggaran dapat sesuai dengan kebutuhan sekolah atau siswa itu sendiri. Ketepatan dalam pengelolaan anggaran akan memberikan suatu nilai positif terhadap pembangunan maupun program peningkatan mutu pendidikan yang dicita-citakan oleh Bangsa Indonesia. Oleh karena itu setiap biaya pendidikan perlu pengelolaan yang tepat guna terutama pada sekolah dasar terpencil sangat membutuhkan pengelolaan pembiayaan pendidikan yang profesional.

Reformasi pendidikan merupakan respon terhadap perkembangan tuntutan global upaya untuk mengadaptasikan sistem pendidikan yang mampu mengembangkan sumber daya manusia untuk memenuhi tuntutan zaman yang sedang berkembang. Melalui reformasi pendidikan, pendidikan harus berwawasan masa depan yang memberikan jaminan bagi perwujudan hak-hak azazi manusia untuk mengembangkan seluruh potensi dan prestasinya secara optimal guna kesejahteraan hidup di masa depan. Pengaruh pendidikan dapat dilihat atau dirasakan secara langsung dalam perkembangan serta kehidupan masyarakat, kehidupan kelompok,

dan kehidupan setiap individu, maka pendidikan berurusan langsung dengan pembentukan manusianya yang diharapkan oleh sistem pendidikan nasional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional.

Munculnya paradigma pemberian otonomi pendidikan kepala sekolah yaitu lahir pemikiran bahwa kepala sekolah paling memahami permasalahan di sekolahnya. Oleh sebab itu, sekolah merupakan unit utama yang harus memecahkan permasalahan melalui sejumlah keputusan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Terkait dengan hal itu sekolah harus memiliki wewenang tidak saja dalam pengambilan keputusan, akan tetapi justru dalam mengatur dan mengurus kepentingan sekolah termasuk mengelolah keuangan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai payung kebijakan makro pendidikan.

Pengelolaan sekolah dengan prinsip profesionalisme dan otonomi pengelolaan agar dapat meningkatkan mutu pendidikan berbasis sekolah dan merespon inovasi. Hal ini penting menggiring pada berfikir analisis kritis dan budaya mutu yang kontekstual sesuai dengan orientasi yang berdaya akan mampu memberikan respon kontekstual sesuai dengan orientasi pembangunan daerah, aspirasi masyarakat, dan para pengguna lulusan pendidikan. Artinya perumusan kebijakan dan pembuatan keputusan di sekolah selalu memperhatikan aspirasi yang berkembang di daerah itu. Dengan demikian pemberdayaan, otonomi dan kemandirian dalam manajemen sekolah bagian dari gerakan jaminan mutu dan akuntabilitas untuk menumbuhkembangkan budaya peduli mutu termasuk dalam hal kemandirian pembiayaan pendidikan.

Terkait dengan biaya pendidikan merupakan komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dapat dikatakan bahwa proses pendidikan tidak dapat dilaksanakan tanpa dukungan biaya, dalam konteks perencanaan pendidikan, pemahaman tentang otonomi dan problematik pembiayaan pendidikan baik pada tingkat makro dan mikro sangatlah diperlukan dalam pembiayaan pendidikan yang lebih tepat dan adil serta mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

Jika dicermati bahwa pradigma pengelolaan keuangan sekolah dalam kerangka otonomi sekolah sangat berbeda dengan pengelolaan keuangan sebelum kebijakan ini diluncurkan. Jika sebelumnya segala pengelolaan keuangan sekolah lebih merupakan hak otoriter sekolah. Namun adanya kebijakan otonomi sekolah, arah kebijakan tersebut dirubah dengan menjadikan orang tua dan masyarakat yang tergabung dalam komite sekolah sebagai mitra yang harus dilibatkan secara aktif dalam keseluruhan pengelolaan keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan pengelolaan keuangan yang seperti ini harus menumbuhkan partisipasi kolektif dari segenap stakholder pendidikan yang ada disekolah karena semuanya dilibatkan dalam proses perencanaan pendidikan sampai dengan tahap evaluasi pendidikan sehingga dapat menghasilkan output yang berkualitas yang dapat berperan aktif dalam masyarakat.

Biaya pendidikan di sekolah merupakan potensi yang sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran dan merupakan bagian integral dalam kajian

manajemen pendidikan. Biaya pendidikan di sekolah juga berkaitan dengan berbagai komponen pendidikan, termasuk guru dan tenaga kependidikan lain yang secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Penghematan biaya pendidikan menuntut kemampuan para pengelola dan tenaga kependidikan di sekolah untuk melakukan perencanaan, melaksanakan kebijakan anggaran, mengadakan pengawasan, melakukan evaluasi serta mempertanggung jawabkan setiap biaya pendidikan yang dikeluarkan secara transparan, efektif, dan efisien. Hal ini sejalan dengan konsep desentralisasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah, meskipun belum sepenuhnya dilaksanakan, karena mengingat bahwa sekolah SD IT dikelola oleh suatu yayasan namun dibawah pengawasan oleh daerah dengan desentralisasi dengan konsep otonomi daerah memberikan keluwesan untuk membangun pendidikan disetiap satuan pendidikan.

Salah satu dana pendidikan yang dikelola oleh sekolah adalah dana kemandirian yang bersumber dari orang tua siswa serta masyarakat dan yayasan disamping itu juga ada dana dari anggaran pemerintah adalah dana BOS lahir dari kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan kepada keluarga miskin yang tidak dapat melanjutkan pendidikan karena kekurangan dana. Melalui kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) peserta didik tingkat pendidikan dasar akan didasarkan dari beban biaya operasional sekolah. Bantuan Operasional Sekolah yang langsung dikelola oleh sekolah meliputi biaya pendaftaran, iuran bulanan sekolah, biaya ujian, bahan ajar dan biaya praktek, penyediaan sarana dan prasarana serta biaya untuk peningkatan mutu guru. Disamping ada anggaran dana BOS yang

dikelolah oleh sekolah adalah dana kemandirian yang dikelolah oleh sekolah bersama komite sekolah yang bersumber dari orang tua siswa dan masyarakat.

Untuk dapat mengelolah anggaran biaya pendidikan secara partisipatif maka perlu usaha proaktif dai sekolah untuk melibatkan komite sekolah sehingga segala hal yang terkait dengan pengelolaan dana diketahui secara terbuka oleh semua pihak. Startegi yang dilakukan dalam pengelolaan dana kemandirian antara lain ditunjukan dengan adanya partisipasi komite dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS). Dalam konteks ini sekolah harus melibatkan segenap potensi guru dan seluruh masyarakat pendidikan untuk memberikan sarana dalam penyusunan RAPBS yaitu agar semua komponen pendidikan di sekolah memiliki tanggung jawab moral untuk melaksanakan serta mengontrol aplikasi dari rencana yang disusun bersama. Sebagai bentuk dari tingkat partisipasi yang tinggi dalam penyusunan RAPBS maka RAPBS tersebut harus dipajangkan sehingga setiap warga sekolah dapat melihat secara langsung rencana yang telah disusun bersama tersebut.

Pada tataran pelaksanaan pembelanjaan anggaran dana pendidikan, kepala sekolah serta seluruh yang terlibat dalam mengelolah keuangan dapat mengkoordinasi semua kegiatan pembelajaran yang dibiayai oleh anggaran yang dikelolah oleh sekolah perlu dijelaskan secara terbuka pada setiap warga sekolah dimana Sekolah Dasar Islam Terpadu adalah yang sekolah yang dikelolah oleh yayasan yang anggaran biaya pendidikan sebagian besar bersumber dari orang tua peserta didik dan masyarakat maka pengeluarannya harus diketahui oleh setiap warga sekolah tentang mekanisme pembelanjaan serta pengeluaran keuangan. Dengan demikian komite

sekolah dapat memberikan masukan atau pertimbangan jika terdapat pembelanjaan atau pengeluaran dana yang kurang sesuai dengan rencana anggaran pendapatan belanja sekolah yang telah disusun. Hal ini merupakan bentuk kontrol atau pengawasan yang efektif dalam rangka lebih meningkatkan pengelolaan keuangan biaya pendidikan ditingkat sekolah dasar terutama di Sekolah Dasar Islam Terpadu yang dikelola oleh yayasan.

selanjutnya untuk lebih mendukung tingkat partisipasi dalam rencana penyusunan pemanfaatan anggaran pendidikan maka perlu dilakukan kegiatan perencanaan dalam pengelolaan anggaran melalui RAPBS adalah rencana anggaran sekolah yang disusun bersama komite sekolah dan masyarakat serta ditegaskan dalam rapat komite sekolah dimana RAPBS merupakan bagian yang terencana operasional sekolah untuk satu tahun. RAPBS memudahkan masyarakat dan sekolah untuk memperkirakan sumber dana apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai target yang ditetapkan. Ini termasuk pula dana-dana untuk kebutuhan tak terduga. RAPBS harus mencerminkan situasi keuangan sekolah yang sebenarnya dan mengusulkan penggunaan dana sesuai prioritas yang telah ditentukan secara jujur, bertanggung jawab dan transparan. Agar rencana sekolah bersifat transparan. Kegiatan perencanaan dilakukan juga perlu melibatkan partisipasi komite sekolah. Setiap temuan dalam kegiatan evaluasi perlu dikomunikasikan kepada komite sekolah sehingga dapat diketahui secara pasti pemanfaatan anggaran pendidikan yang ada disekolah. Evaluasi itu perlu akan menjadi tolak ukur keberhasilan pengelolaan anggaran untuk pemanfaatan selanjutnya.

Agar dapat menjalankan kegiatan-kegiatan di sekolah secara optimal, penting agar semua kebutuhan sekolah yang diprioritaskan di masukan kedalam RAPBS harus melibatkan kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan warga sekolah. RAPBS harus konsisten atau sejalan dengan rencana pengembangan sekolah. Perlu diterapkan kontrol tegas, termasuk proses pelaporan yang terbuka, transparan dan akurat.

Mencermati uraian di atas bahwa tingkat partisipasi yang tinggi dalam pemanfaatan anggaran pendidikan ditunjukkan oleh hal-hal sebagai berikut antara lain adanya peran komite sekolah dalam penyusunan anggaran dan evaluasi pemanfaatan dana kemandirian pendidikan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi aktif komite sekolah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran keuangan pendidikan di sekolah dasar.

Sekolah Dasar Islam Terpadu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato merupakan salah satu sekolah swasta yang dibiayai oleh yayasan mendapatkan anggran dan BOS dari pemerintah daerah sebagai dana operasional membantu para peserta didik yang ekonomi lemah yang telah dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan. Namun sekolah dasar ini mempunyai anggaran kemandirian yang bersumber dari orang tua peserta didik dan masyarakat serta dari yayasan yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik.

Namun realitas yang ada sesuai dengan observasi awal pada SD IT Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato peneliti lakukan dilapangan menunjukan bahwa pengelolaan keuangan sekolah masih sepenuhnya merupakan otoriter kepala

sekolah. Meskipun sekolah memiliki bendahara, namun kurang berfungsi karena pengelolaan keuangan sekolah hampir semuanya ditangani oleh kepala sekolah. Pengelolaan keuangan oleh sebgaiian kepala sekolah tersebut terindikasi kurang prosedural bahkan sering menyimpang atau bertentangan dengan prinsip dasar pengelolaan keuangan sekolah. Hal ini mengakibatkan pengelolaan keuangan sekolah sangat rentang dengan penyelewengan dalam pengeluaran anggaran pembiayaan pendidikan. Kondisi ril di lapangan menunjukan bahwa dalam penyusunan anggaran RAPBS hanya dilakukan antara kepala sekolah dengan bendahara. Tingkat keterlibatan komite sekolah masih kurang dalam hal ini komite sekolah hanya merupakan simbol dalam mitra kerja kepala sekolah. Dalam kegiatan pembelanjaan dana pembiayaan anggaran pendidikan komite sekolah tidak dilibatkan baik dalam pegeluaran maupun pembelanjaan.

Mencermati realita yang ada sesuai dengan observasi awal penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan memformulasikan judul “**Kemandirian Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Dasar Islam Terpadu di SD IP Al-izzah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato**”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitan diatas maka fokus penelitian adalah:

1. Kemandirian perencanaan penyusunan anggaran pendidikan di Sekolah Dasar Islam Terpadu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato
2. Kemandirian pelaksanaan program anggaran pendidikan di Sekolah Dasar Islam Terpadu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato

3. Kemandirian melakukan pengawasan terhadap kebijakan program anggaran pembiayaan pendidikan di Sekolah Dasar Islam Terpadu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato
4. Kemandirian sumber-sumber pembiayaan pendidikan di Sekolah Dasar Islam Terpadu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato

**C. Tujuan Penelitian:**

1. Untuk mengetahui kemandirian perencanaan menyusun anggaran pendidikan di Sekolah Dasar Islam Terpadu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato
2. Untuk mengetahui kemandirian pelaksanaan program anggaran pendidikan di Sekolah Dasar Islam Terpadu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato
3. Untuk mengetahui kemandirian melakukan pengawasan terhadap kebijakan program anggaran pembiayaan pendidikan di Sekolah Dasar Islam Terpadu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato
4. Untuk mengetahui kemandirian sumber sumber pembiayaan pendidikan di Sekolah Dasar Islam Terpadu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato

**D. Manfaat Penelitian**

1. Untuk kepala sekolah sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran pembiayaan pendidikan
2. Untuk seluruh warga sekolah sebagai bahan masukan terutama kepala sekolah, bendahara tentang substansi keterlibatan komite sekolah dari perencanaan samapai dengan evaluasi pemanfaatan anggaran pembiayaan pendidikan

3. Untuk komite sekolah merupakan sebuah badan independen yang mewakili masyarakat dalam pengelolaan sekolah secara transparan
4. Untuk warga sekolah dapat memberikan masukan, rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan program pendidikan
5. Untuk peneliti sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut